

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Organisasi dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah perlu menggunakan teknologi informasi (TI) untuk membuat pekerjaan mereka lebih efisien dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan TI yang baik dan tepat. TI harus dikelola dengan baik agar tata kelola perusahaan berhasil. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) merupakan suatu komponen yang koheren pada suatu organisasi atau lembaga yang menitikberatkan pada manajemen kinerja dan keseluruhan risiko pemanfaatan teknologi informasi yang terkait dengan proses dan aktivitas bisnis sehingga dapat dikendalikan dengan baik (Pradnya et al., 2020).

Pemerintah didorong untuk melakukan perbaikan internal dan eksternal, terutama berkenaan dengan penerapan e-government, karena perluasan program pemerintah dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di bidang pendidikan, TIK sangat penting dalam mencapai tujuan dan visi suatu organisasi (Bouty et al., 2019).

TIK merupakan infrastruktur pembelajaran yang penting di mana bahan ajar tersedia secara digital. Hal ini memungkinkan untuk mengatur proses pembelajaran yang tidak tergantung pada waktu dan tempat. Pemerintah kabupaten mengatakan

TIK memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing negara. Oleh karena itu, peningkatan penguasaan TIK menjadi hal yang penting. Untuk meningkatkan penguasaan TIK, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang bagaimana TIK dapat dimanfaatkan secara produktif di segala bidang kehidupan.

Pemerintah menggunakan teknologi yang berkembang pesat. E-government adalah sebutan untuk sistem pemerintahan. Istilah "e-government" mengacu pada penggunaan TIK oleh pemerintah bersamaan dengan perubahan organisasi untuk meningkatkan operasi dan struktur pemerintahan (Twizeyimana & Andersson, 2019).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang disingkat SPBE merupakan lembaga pemerintah yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Yuhefizar mengklaim SPBE memiliki sejumlah keunggulan, antara lain menyediakan informasi dan layanan kepada masyarakat, memudahkan pelaku usaha di lingkungan bisnis, mendorong kolaborasi antarpemerintah terkait, meningkatkan efektivitas lembaga pemerintah, dan memungkinkan pengelolaan lembaga yang efektif sesuai dengan kewenangannya (Yuhefizar et al., 2019).

Tingkat pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah harus dinilai secara menyeluruh agar dapat memenuhi target pelaksanaan. Penetapan Indeks SPBE merupakan tujuan dari evaluasi pelaksanaan SPBE. Tingkat kematangan SPBE di setiap instansi pemerintah dapat direpresentasikan secara visual melalui indikator ini. (Pratiwi et al., 2020). Tingkat kematangan dapat diukur dari beberapa hal yaitu

teknologi, operasional organisasi, kemampuan sumber daya, serta proses dari organisasi itu sendiri (Bouty et al., 2019).

Pelaksanaan evaluasi SPBE ini menggunakan versi lama yang mana untuk menilai sistennya apakah layak untuk digunakan kedepannyaa di lingkungan pemerintah. Sistem di daerah ini belum menyeluruh dan tidak semua pemerintah provinsi berpartisipasi dalam evaluasi SPBE yang dilakukan oleh KemPembkab, direktur SPBE di Indonesia, melalui perluasan SPBE. Kerangka kerja yang menurunkan tingkat penerapan SPBE dikenal sebagai tingkat kematangan SPBE. Domain adalah area dimana kegiatan SPBE dilaksanakan dan kemudian dievaluasi. SPBE diciptakan sebagai alat untuk menurunkan ambang batas kapabilitas proses dan layanan. Tingkat kematangan kapabilitas proses digunakan untuk menyesuaikan tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Dengan menggunakan tingkat kematangan kapabilitas layanan, tingkat kapabilitas SPBE disesuaikan. (Altha, 2022).

Tahun	Indeks	Skor Indeks
2021	2,34	46%
2022	2,80	56%
2023	2,79	55%

Meskipun indeks diatas berada di atas rata-rata nasional, namun nilai di Provinsi Jawa Tengah masih dalam kategori cukup. SPBE di Jawa Tengah memiliki nilai provinsi tertinggi di Indonesia. Indeks SPBE kami berada pada angka 3,68. Harapan kedepannya saat Menteri PANRB harus menerapkan SPBE pada tahun 2020 (Pembkab Purworejo, 2023). Pemerintah perlu memberikan bantuan melalui perizinan, percepatan, dan pelayanannya. Diharapkan e-government akan

membantu pemerintah dalam memberikan layanan dan memperkuat hubungannya dengan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah lainnya. Penerapan e-government di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(Perpres, 2018). Padahal SPBE bisa dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada 8 aspek pemkab yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan indeks SPBE yang baik diharapkan 8 aspek tersebut bisa dipenuhi dengan baik pula.

Permasalahan pertama adalah terkait aspek pelayanan publik di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Beberapa permasalahan umum yang sering ditemui antara lain adalah birokrasi yang berbelit-belit, prosedur yang rumit, dan waktu pelayanan yang lama. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur juga menjadi faktor penghambat (Sutedi 2024). Akibatnya, masyarakat seringkali merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Permasalah selanjutnya adalah terkait pembangunan infrastruktur teknologi di tingkat kabupaten yang terkadang masih memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang seringkali menghambat pengadaan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi (TI) juga menjadi kendala signifikan. Tantangan lainnya adalah infrastruktur jaringan yang belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga menghambat aksesibilitas terhadap layanan berbasis teknologi (Bazarah dkk, 2021). Selain itu, kurangnya

kesadaran dan literasi digital di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah juga menjadi faktor penghambat adopsi teknologi.

Permasalahan yang juga terlihat adalah Implementasi SPBE di Pemkab Purworejo yang ternyata masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di sektor perekonomian, misalnya, kendala interoperabilitas sistem dan kurangnya standar data yang seragam menghambat integrasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik (Dinar dkk, 2023). Dalam bidang pendidikan, permasalahan digital divide dan kurangnya infrastruktur teknologi di daerah terpencil menjadi penghalang akses terhadap layanan pendidikan berbasis teknologi (Mutia 2024). Di sektor kesehatan, kendala dalam integrasi data rekam medis dan sistem rujukan antar fasilitas kesehatan masih menjadi permasalahan (Dwianggoro & Nuriluta (2024). Sementara itu, di sektor keamanan, ancaman siber dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama (Trianto dkk, 2024). Dalam konteks lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan data lingkungan belum optimal. Terakhir, dalam mendorong partisipasi masyarakat, tantangan utama adalah meningkatkan literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik (Anugrah & Parwanti, 2024).

Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan penilaian indeks pada Pemkab Purworejo. Pemkab Purworejo memiliki fungsi sebagai pengelolaan informasi, pelayanan informasi, dan membantu integrasi aplikasi layanan publik. Pedoman evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPBE. Evaluasi ini penting dilakukan untuk membuat sistem pemerintahan yang baik dalam melayani masyarakat dengan efektif.

Penerapan Manajemen Aset TIK, Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan tujuan untuk perbaikan berkelanjutan. Domain Manajemen SPBE akan menjadi fokus penelitian ini berdasarkan hasil identifikasi permasalahan. Perencanaan dan pelaksanaan SPBE secara keseluruhan dapat terhambat apabila terdapat kelemahan pada indeks Domain Pengelolaan SPBE. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini adalah untuk menilai domain manajemen SPBE guna memastikan keberhasilan penerapannya di masa mendatang.

Dari permasalahan yang telah muncul, bahwa judul yang ditetapkan pada penelitian ini adalah “Evaluasi dan Penilaian Indeks SPBE Nasional pada Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan di Pemkab Purworejo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan sebelumnya dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya.

1. SPBE adalah hal yang penting karena bisa mengatasi permasalahan pada 8 aspek Pemkab namun indeks SPBE di Pemkab Purworejo masih rendah.
2. Implementasi SPBE di Pemkab Purworejo yang ternyata masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks
3. Evaluasi SPBE ini pada lingkungan pemerintah daerah Purworejo belum terlaksana dan berjalan dengan maksimal sehingga dapat mempengaruhi perkembangan SPBE pada lingkungan pemerintah daerah di Purworejo.

4. Penerapan evaluasi SPBE ini pada lingkungan pemerintah daerah belum terlaksana dan berjalan dengan maksimal.
5. Proses pengelolaan dan tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Purworejo belum terintegrasi dengan proses manajemen lainnya sehingga menyebabkan kinerja organisasi menurun.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini diantaranya yaitu.

1. Penelitian dilakukan di Pemkab Purworejo.
2. Evaluasi dan penilaian indeks SPBE nasional hanya dilakukan pada tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.
3. Prioritas perbaikan SPBE akan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Pemkab Purworejo.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu.

1. Bagaimana penilaian indeks SPBE pada Pemkab Purworejo?
2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan indeks SPBE yang dilakukan pada layanan Pemkab Purworejo?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan hasil evaluasi dan penilaian indeks SPBE nasional hanya dilakukan pada tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan Pemkab Purworejo.
2. Menjelaskan dan mendeskripsikan upaya dalam meningkatkan indeks SPBE yang dilakukan pada tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan Pemkab Purworejo.
3. Menjelaskan dan mendeskripsikan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan *e-government* di Purworejo.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu.

1. Memberikan rekomendasi melalui evaluasi dan penilaian indeks SPBE yang dilakukan pada tingkat kematangan informasi pada layanan Pemkab Purworejo serta membantu dalam memperbaiki keamanan informasi pada instansi.
2. Memberikan solusi dan masukan pada pengelola keamanan informasi Dinas Pemkab Purworejo yang dapat digunakan untuk perbaikan keamanan informasi dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keamanan informasi dari Pemkab.
3. Penyediaan informasi tentang sistem administrasi yang didukung secara elektronik. Pengembangan nilai tingkat kematangan SPBE, yang dapat menjadi dasar untuk studi evaluasi SPBE di masa mendatang.
4. Menjadi referensi pada peneliti selanjutnya mengenai evaluasi SPBE